

# Aspirasi

VOL. 14 NO. 1, JUNI 2023 JURNAL MASALAH-MASALAH SOSIAL

- Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia

*Monika Teguh, Toetik Koesbardiati, Rachmah Ida, Ratih Puspa, Yavrina Syafarani*

- Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung

*Elga Andina*

- Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat

*Caecilia Meyta Rahayuningtyas, Ahyahudin Sodri, dan Lina Tri Mugi Astuti*

- Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

*Irfan Ardani dan Diyan Ermawan Effendi*

- Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta

*Pajar Hatma Indra Jaya*

- Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020

*Rabiah Al Adawiah dan Fransiska Novita Eleanora*

- Mapping Survey of Public Acceptance on Development Nuclear Power Plant (NPP) in Bangka Belitung Province

*Drajat Tri Kartono, Sri Hastjarjo, Sajidan Sajidan, Bob Soelaiman Effendi, Dhita Karunia Ashari, Purbayakti Kusuma Wijayanto, Zahra Nadhila Saraswati, Herwanto Gede Sulistyawan, Lutfi Andriani*

ASP	VOL. 14	NO. 1	JAKARTA JUN 2023	P-ISSN: 2086-6305 E-ISSN: 2614-5863
-----	---------	-------	---------------------	--



Diterbitkan Oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Diterbitkan Oleh:  
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





# Aspirasi

JURNAL MASALAH-MASALAH SOSIAL

---

Vc Vol. 14 No. 1, Juni 2023

P-ISSN: 2086-6305  
E-ISSN: 2614-5863

Merupakan jurnal enam bulanan yang terbit pertama kali 1 Juni 2010  
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis mengenai topik yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau isu-isu terkini di bidang sosial yang perlu mendapat perhatian DPR Republik Indonesia.

**Pimpinan Redaksi**

Achmad Muchaddam Fahham,  
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

**Redaktur Pelaksana**

Nur Sholikah Putri Suni, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

**Dewan Redaksi**

Yulia Indahri, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Rohani Budi Prihatin, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

**Mitra Bestari**

Wahyu Sulistiadi, Universitas Indonesia  
Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si, Lektor Kepala Universitas Bina Nusantara  
Santri E.P. Djahimo, Ph.D., Universitas Nusa Cendana, Indonesia  
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Aris Arif Mundayat Ph.D., Universitas Sebelas Maret

**Editor**

Dinar Wahyuni, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Anih Sri Suryani, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Mohammad Teja, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Rahmi Yuningsih, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Teddy Prasetiawan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Fieka Nurul Arifa, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

**Tata Usaha**

Yeti Ifana  
Kabri

**Alamat Redaksi dan Tata Usaha**

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1, Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
email: pengkajian.kesos@dpr.go.id

**Penerbit**

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.  
Pedoman penulisan naskah tercantum pada halaman belakang.

# DAFTAR ISI

<b>Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia .....</b>	1–14
<i>Monika Teguh, Toetik Koesbardiati, Rachmah Ida, Ratih Puspa, Yavrina Syafarani</i>	
<b>Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung .....</b>	15–35
<i>Elga Andina</i>	
<b>Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat .....</b>	37–57
<i>Caecilia Meyta Rahayuningtyas, Ahyahudin Sodri, dan Lina Tri Mugi Astuti</i>	
<b>Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan .....</b>	59–82
<i>Arief Priyo Nugroho, Irfan Ardani, dan Diyan Ermawan Effendi</i>	
<b>Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta .....</b>	83–99
<i>Pajar Hatma Indra Jaya</i>	
<b>Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020 .....</b>	101–119
<i>Rabiah Al Adawiah dan Fransiska Novita Eleanora</i>	
<b>Mapping Survey of Public Acceptance on Development Nuclear Power Plant (NPP) in Bangka Belitung Province .....</b>	121–140
<i>Drajat Tri Kartono, Sri Hastjarjo, Sajidan Sajidan, Bob Soelaiman Effendi, Dhita Karunia Ashari, Purbayakti Kusuma Wijayanto, Zahra Nadhila Saraswati, Herwanto Gede Sulistyawan, Lutfi Andriani</i>	

# KATA PENGANTAR

Dalam Volume 14 Nomor 1, terdapat 7 artikel yang memberikan wawasan yang berharga. Artikel pertama, berjudul "Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia" oleh Monika Teguh, Toetik Koesbardiati, Rachmah Ida, Ratih Puspa, Yavrina Syafarani, mengulas dampak budaya adaptif dan budaya ideasional dalam konteks kasus stunting di Indonesia.

Berikutnya, "Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung" karya Elga Andina, menyoroti upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung yang terancam punah karena asimilasi dengan pendatang. Penulis menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, dokumentasinya, memberikan dukungan konsisten dari pemerintah, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikannya.

Artikel selanjutnya, "Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat" oleh Caecilia Meyta Rahayuningtyas, Ahyahudin Sodri, dan Lina Tri Mugi Astuti, menjelaskan bagaimana masyarakat dan produsen mengatasi permasalahan sampah saset di Kota Depok. Penelitian ini menemukan bahwa sampah saset dapat dikelola dengan sukses melalui program 3R (*reduce, reuse, and recycle*), yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan bank sampah dalam pengumpulan sampah.

Para peneliti dari Badan Riset Nasional, Arief Priyo Nugroho, Irfan Ardani, & Diyan Ermawan Effendi, dalam artikel berjudul "Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan", menyoroti dampak kebijakan akreditasi puskesmas terhadap kualitas layanan kesehatannya. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan akreditasi puskesmas mendorong perubahan nilai dan norma pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, mengubahnya dari barang publik menjadi barang privat.

Artikel selanjutnya berjudul "Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta," ditulis oleh Pajar Hatma Indra Jaya. Dalam artikel ini, penyintas Covid-19 menghadapi eksklusi sosial dalam bentuk isolasi saat mencoba untuk kembali bekerja. Rasa takut akan stigmatisasi sosial dan menjaga jarak dari mereka yang sembuh mengakibatkan kurangnya dukungan komunitas, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi selama lebih dari sebulan.

Sementara itu, dalam penelitian berjudul "Perundungan di Dunia Maya terhadap Anak: Analisis Fenomena dan Tren Tahun 2016–2020" oleh Rabiah Al Adawiah dan Fransiska Novita Eleanora, terungkap bahwa perundungan di dunia maya semakin meluas, khususnya di media sosial, dengan anak-anak menjadi korban atau pelaku. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara fisik, psikis, maupun akademik. Perundungan di dunia maya bahkan dianggap lebih berbahaya daripada perundungan konvensional karena jejak digitalnya dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan geografis.

# KATA PENGANTAR

Selanjutnya, dalam artikel berjudul "Studi Penerimaan Publik terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Bangka Belitung" oleh Drajat Tri Kartono dan rekan-rekannya, ditemukan bahwa masyarakat di Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan memberikan tingkat penerimaan sebesar 73,73 persen terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Hal ini didukung oleh persepsi positif masyarakat terhadap manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, tingkat risiko PLTN sebesar 70,93 persen, keyakinan akan niat baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan keyakinan akan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen.

Kami dengan bangga menyajikan artikel-artikel ini dalam edisi terbaru Jurnal Aspirasi. Untuk edisi ini, kami mengadopsi pedoman Ejaan Yang Disempurnakan V yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 2022. Selama proses penerbitan, para editor kami dengan teliti mengedit dan meninjau setiap naskah demi memastikan agar semuanya dapat diterbitkan tepat waktu. Kami sangat menghargai kontribusi tim editorial dan masukan yang berharga dari manajemen dalam upaya kami untuk menghasilkan publikasi berkualitas. Terakhir, kami mengucapkan rasa terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah memberikan saran-saran yang berharga untuk perbaikan artikel-artikel ini guna publikasi yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 30 Juni 2023



redaksi

# Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia

**Monika Teguh, Toetik Koesbardiati,  
Rachmah Ida, Ratih Puspa, dan Yavrina  
Syafarani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

**DOI** <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.2896>

**HALAMAN** 1–14

## ABSTRACT

*Stunting is a form of malnutrition that occurs as a result of improper child-rearing practices that cause a child to lack nutrition from the womb until the first thousand days of life. In 2021, 24.4% of Indonesian toddlers still experience stunting. One of the causes is a culture that is not in line with healthy living behaviors. This study will answer the question of what culture has an impact on the stunting cases in Indonesia? The research method used is descriptive qualitative with literature study as the basis for its data. The results of the research show various cultural roles both adaptive and ideational cultures that contribute to stunting. Adaptive cultures that play a role in stunting include hustle culture, working mothers, and education. Meanwhile, ideational cultures that still have an impact on stunting until now include beliefs, early marriage, incorrect feeding, and incorrect feeding methods. It is hoped that the results of this study can provide a contribution to the study of public health and more effective health promotion in the future.*

### KEYWORDS

causes of stunting; stunting health promotion; adaptive culture; ideational culture

## ABSTRAK

Stunting merupakan kasus kekerdilan yang terjadi akibat kesalahan pola asuh anak yang menyebabkan anak kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan. Pada tahun 2021 masih terdapat 24,4 persen anak balita yang mengalami stunting di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan perilaku hidup sehat. Studi ini akan menjawab pertanyaan budaya apa yang berdampak terhadap kasus stunting di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai dasar datanya. Hasil dari penelitian menunjukkan berbagai peranan budaya baik budaya adaptif maupun budaya ideasional yang turut mendorong terjadinya stunting. Budaya adaptif yang berperan dalam terjadinya stunting antara lain *hustle culture*, ibu bekerja, dan pendidikan. Sementara itu, budaya ideasional yang juga masih berpengaruh terhadap terjadinya stunting sampai saat ini antara lain kepercayaan, pernikahan dini, kesalahan pemberian makanan, dan kesalahan cara pemberian makanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kajian kesehatan budaya ideasional masyarakat dan promosi kesehatan yang lebih efektif ke depannya.

### KATA KUNCI

stunting; penyebab stunting; promosi kesehatan stunting; budaya adaptif; budaya ideasional masyarakat dan promosi kesehatan yang lebih efektif ke depannya.

# Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung

Elga Andina

Pusat Analisis Keparlemenan

DOI <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i1.2989>

HALAMAN 15 – 35

## ABSTRACT

*The revitalization of local languages in Indonesia has become an increasingly important issue and required serious attention. The Ministry Of Education, Culture, Research and Technology responded to this crisis by implementing Merdeka Belajar Episode 17, which focuses on revitalizing local languages in the province of Lampung in 2023. This research aims to evaluate the challenges of revitalizing local languages implemented by the government in Lampung province. Using a qualitative descriptive approach with a case study pattern, primary data was obtained from interviews and focused group discussions with government agencies involved in revitalizing local languages, including the Lampung Provincial Language Office, the Lampung Provincial Education Office, and the Welfare Department of the Lampung Provincial Government, in addition to academic from Lampung University. The study found that in Lampung province, revitalization is carried out through structured learning activities in schools by using the Model B approach, which included teaching local content, especially Lampung language. Although there are compulsory regulations to teach Lampung language in primary and secondary schools, several challenges have still remained, such as psychological barriers faced by communities in using local languages, insufficient support from the government, and weak interagency coordination in implementing language revitalization programs. Overcoming these challenges requires joint efforts from all parties to promote the use of local languages and document them, provide consistent government support, and increase public awareness of the importance of preserving them. It is expected that the result of this study can contribute to the improvement and enrichment of the cultural diversity in Indonesia.*

## KEYWORDS

local language revitalization; Merdeka Belajar Episode 17, revitalization model B

## ABSTRAK

Revitalisasi bahasa daerah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius. Kemendikbudristek merespons krisis tersebut dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola studi kasus, data primer diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan instansi pemerintah pelaksana revitalisasi bahasa daerah, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, ditambah dengan akademisi Universitas Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa di Provinsi Lampung revitalisasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah dengan menggunakan pendekatan Model B yang mencakup pengajaran konten lokal, khususnya bahasa Lampung. Meskipun sudah ada regulasi untuk mengajarkan bahasa Lampung di sekolah dasar dan menengah, tantangan masih ada seperti hambatan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah, dukungan yang kurang dari pemerintah, dan koordinasi antarlembaga yang lemah dalam menjalankan program pemulihhan bahasa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, mendokumentasikannya, memberikan dukungan pemerintah yang konsisten, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestariannya. Dengan melakukan hal tersebut, bahasa daerah di Indonesia dapat terus berkembang dan memperkaya keanekaragaman budaya di negara ini.

## KATA KUNCI

revitalisasi bahasa daerah; Merdeka Belajar Episode 17, revitalisasi model B

# Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat

**Caecilia Meyta Rahayuningtyas\***,  
**Ahyahudin Sodri\***, & **Lina Tri Mugihastuti\***

\*Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

\*\*Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, UI

DOI <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3419>

HALAMAN 37–57

## ABSTRACT

*Plastic is widely used as packaging, thereby increasing plastic production. One form is the use of sachets or multilayer plastic, which are widely used for food packaging and household needs. Packaging using sachets is widely used in Indonesia because the price is more economical. However, the community has not been effective in sorting their household waste, so that a lot of unmanaged plastic waste is wasted and accumulates in landfills. Law Number 18 of 2008 states that every producer is responsible for the waste they produce. However, there are only a few producers who process and recycle their sachet waste, so that scavengers and waste banks also do not accept sachet waste. This has an impact on the environment, where sachet waste is difficult to decompose. The purpose of this research is to analyze community and producer participation in waste management through the implementation of extended producer responsibility (EPR), thereby increasing the plastic circular economy. The location of this research was conducted in Depok City, which disposes of its waste to the Cipayung Landfill, Depok. Cipayung Landfill has exceeded its capacity. This research uses quantitative methods, through observation, questionnaires, and literature studies. Based on this study, it was concluded that the composition of 17 percent sachet waste can be managed with the 3R program (reduce, reuse, and recycle), which is supported by community participation in waste segregation and waste banks in the collection, where waste banks can reduce 20 percent inorganic waste, and are supported by manufacturers with the implementation of EPR.*

### KEYWORDS

EPR;  
sorting;  
sachet plastic;  
circular economy

## ABSTRAK

Di Indonesia, banyak produsen memilih menggunakan saset plastik karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan bahan kemasan lainnya. Namun, penggunaan saset plastik menimbulkan masalah pengelolaan sampah. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, masih sedikit produsen yang mengelola dan mendaur ulang sampah sasetnya. Hal ini menyebabkan pemulung dan bank sampah juga tidak menerima sampah saset. Sebagai akibatnya, sampah plastik yang tidak terkelola menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperburuk masalah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah saset melalui penerapan extended producer responsibility (EPR), sehingga meningkatkan ekonomi sirkular plastik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Depok, yang membuang sampahnya ke TPA Cipayung, Depok. TPA Cipayung ini sudah melebihi daya tampungnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik observasi, kuesioner, dan studi literatur untuk memperoleh data. Dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah saset sebesar 17 persen dapat dikelola dengan program 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan bank sampah dalam pengumpulannya. Bank sampah dapat mengurangi 20 persen sampah anorganik dengan cara ini, yang didukung oleh produsen dengan penerapan EPR.

### KATA KUNCI

bank sampah;  
EPR;  
pemilahan  
sampah;  
plastik saset

# Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Arief Priyo Nugroho, Irfan Ardani, & Diyan Ermawan Effendi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

DOI <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3039>  
HALAMAN 59 – 82

## ABSTRACT

*Puskesmas/primary health center (PHC) accreditation policy has a relative impact on improving health services quality. In addition to management and organizational improvements, PHC accreditation has negative excesses which can be seen in the implementation process. Namely, the issue of fulfilling citizens' basic rights to health. This study aims to explain some of the negative excesses of PHC accreditation policy to fulfill health care access. A qualitative analysis of various interviews in roundtable discussions and secondary data collection on the process and implementation of accreditation in 12 districts/cities. This study shows that the PHC accreditation policy that was carried out encouraged a shift in the Government's values and norms in providing essential health services, from public goods to private goods. The management logic that tends to be private-like-oriented places the community as a consumer rather than as a citizen, not yet maximizing the active role of the community raises the issue of inequity in the country's efforts to guarantee the rights of the community as citizens. The Government places basic health services no longer fully as public goods, which ensures that every people as a citizen can access them without exception.*

### KEYWORDS

basic health service;  
inequity;  
PHC  
accreditation

## ABSTRAK

Kebijakan akreditasi puskesmas relatif memiliki pengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan. Selain terdapat perbaikan manajemen dan organisasi, akreditasi puskesmas memiliki ekses negatif yang terlihat pada proses implementasinya, terutama dalam permasalahan pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan akreditasi puskesmas menimbulkan ekses negatif dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam diskusi meja bundar dan data sekunder dari pengalaman pelaksanaan akreditasi puskesmas di 12 kabupaten/kota. Studi ini menemukan bahwa kebijakan akreditasi puskesmas yang dilakukan mendorong pergeseran nilai dan norma pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, yaitu perubahan dari barang publik menjadi barang privat. Logika pengelolaan yang lebih cenderung *private-like-oriented*, menempatkan masyarakat sebagai konsumen dibanding sebagai warga negara, belum maksimalnya peran aktif masyarakat memunculkan isu kesenjangan dalam upaya negara menjamin hak masyarakat sebagai warga negara. Pemerintah menempatkan pelayanan kesehatan dasar tidak lagi sepenuhnya sebagai barang publik yang menjamin setiap masyarakat sebagai warga negara mampu mengakses tanpa terkecuali.

### KATA KUNCI

akreditasi  
puskesmas;  
kesenjangan;  
pelayanan  
kesehatan dasar

# Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta

Pajar Hatma Indra Jaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga

DOI <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3204>

HALAMAN 83–99

## ABSTRACT

*This study explores the survival strategies employed by Covid-19 survivors to improve their economic activities, with a specific focus on culinary entrepreneurs. Despite recovering from the virus, these individuals continue to face obstacles in resuming their businesses. Limited research has been conducted on the strategies adopted by survivors after their recovery, particularly in the culinary sector. This paper presents qualitative data collected through observation, document study, and interviews. The study includes twelve informants from six cases of Covid-19 transmission, purposively selected to investigate their perceptions and practices regarding economic survival post-recovery. The findings reveal that Covid-19 survivors encounter social exclusion in the form of isolation when attempting to resume work. The fear of societal stigmatization and maintaining distance from survivors results in a lack of community support, leading to economic stagnation for over a month. Despite efforts to obtain a health certificate from the government, the survivors struggle to restore normalcy. Consequently, they adopt various survival strategies, although these methods often require a considerable amount of time to achieve full recovery. To address this issue, the Indonesian House of Representatives should provide support, including oversight of government policies. It is recommended that when the government forces the closure of a business, they must also offer assistance and facilitate the official reopening after the recovery period. This approach will help restore consumer confidence and expedite economic recovery. It is crucial to learn from these findings to better prepare for similar situations in the future.*

### KEYWORDS

Covid-19  
survivors;  
normalization;  
obstacle; social  
exclusion;  
survive strategy

## ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi strategi bertahan yang digunakan oleh penyintas Covid-19 untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka, dengan fokus khusus pada para pengusaha kuliner. Meskipun telah sembuh dari virus, mereka ini tetap menghadapi hambatan dalam melanjutkan usaha mereka. Penelitian mengenai strategi yang diadopsi oleh mereka setelah pulih, terutama di sektor kuliner, masih terbatas. Makalah ini menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Penelitian ini melibatkan dua belas informan dari enam kasus penularan Covid-19, yang dipilih secara sengaja untuk menyelidiki persepsi dan praktik mereka terkait bertahan secara ekonomi setelah pulih. Temuan menunjukkan bahwa mereka yang selamat dari Covid-19 menghadapi eksklusi sosial dalam bentuk isolasi saat mencoba untuk kembali bekerja. Rasa takut akan stigmatisasi sosial dan menjaga jarak dari mereka yang sembuh mengakibatkan kurangnya dukungan komunitas, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi selama lebih dari sebulan. Meskipun telah berusaha mendapatkan hasil tes negatif dari pemerintah, mereka masih kesulitan kembali ke kondisi normal. Oleh karena itu, mereka mengadopsi berbagai strategi bertahan, meskipun metode ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pemulihan penuh. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebaiknya memberikan dukungan, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Direkomendasikan agar ketika pemerintah memaksa penutupan suatu bisnis, mereka juga harus menawarkan bantuan dan memfasilitasi pembukaan kembali resmi setelah masa pemulihan. Pendekatan ini akan membantu mengembalikan kepercayaan konsumen dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sangat penting untuk belajar dari temuan ini agar dapat lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.

### KATA KUNCI

hambatan;  
normalisasi;  
pengasingan;  
penyintas Covid-19;  
strategi bertahan

# Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020

Rabiah Al Adawiah, Fransiska Novita Eleanora  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3065>  
HALAMAN 101–119

## ABSTRACT

*Cyberbullying has become a worrying phenomenon, especially among children. Increased use of the internet and social media among children may increase their risk of experiencing cyberbullying. In this study, the author raises the issue of the phenomenon of cyberbullying, its impact and prevention efforts on children. The purpose of this research is to provide education and preventive measures to protect children from cyberbullying. In this study, the authors used the library research method using secondary data obtained from KPAI, UNICEF, and other research published in the form of articles, journals or other references. The stages of the research started from selecting the topic, formulating the problem, analyzing it, and compiling the report. The results of this study indicate that cyberbullying is rife, especially on social media with children who are victims and perpetrators. This phenomenon has an impact physically, psychologically, and academically. The impact of cyberbullying is more harmful than traditional bullying because cyberbullying leaves a digital footprint that can be seen by everyone regardless of physical distance. Therefore, as a form of protection for children, efforts to prevent cyberbullying are necessary. Families and communities can provide education to children in using social media. In addition, the role of the legislature (DPR RI) is needed in providing adequate regulations, because regulations related to cyberbullying and its legal consequences have not been clearly regulated in the information and electronic transaction law or child protection law.*

### KEYWORDS

preventif; child protection; cyberbullying; impact; prevention; social media

## ABSTRAK

Perundungan dunia maya telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan anak-anak dapat meningkatkan risiko mengalami perundungan dunia maya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah fenomena perundungan dunia maya, dampak, dan upaya pencegahannya pada anak. Adapun tujuan penelitian ini memberikan edukasi dan upaya preventif untuk melindungi anak dari perundungan dunia maya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPAI, UNICEF, serta penelitian lain yang dipublikasikan dalam bentuk artikel, jurnal, atau referensi lainnya. Tahapan penelitian dimulai dari pemilihan topik, perumusan masalah, analisis, dan penyusunan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan dunia maya marak terjadi terutama di media sosial dengan anak yang menjadi korban maupun pelakunya. Fenomena tersebut berdampak secara fisik, psikis, maupun akademik. Dampak perundungan dunia maya lebih berbahaya daripada perundungan tradisional karena perundungan dunia maya meninggalkan jejak digital yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan upaya pencegahan perundungan dunia maya. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan edukasi kepada anak dalam penggunaan media sosial. Selain itu, diperlukan peran lembaga legislatif (DPR RI) dalam menyediakan regulasi yang memadai, karena regulasi terkait perundungan dunia maya dan akibat hukumnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun undang-undang perlindungan anak.

### KATA KUNCI

dampak; media sosial; perlindungan anak; perundungan dunia maya

# Mapping Survey of Public Acceptance on Development Nuclear Power Plant (NPP) in Bangka Belitung Province

Drajat Tri Kartono\*, Sri Hastjarjo\*, Sajidan Sajidan\*, Bob Soelaiman Effendi\*\*, Dhita Karunia Ashari\*\*, Purbayakti Kusuma Wijayanto\*\*\*, Zahra Nadhila Saraswati\*\*, Herwanto Gede Sulistyawan\*, Lutfi Andriani \*

\* Sebelas Maret University, \*\* PT. Thorcon Power Indonesia,

\*\*\* Slamet Riyadi University

DOI <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.3143>

HALAMAN 121–137

## ABSTRAK

*Indonesia sebagai negara yang belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih perlu melakukan riset untuk mengkaji penerimaan masyarakat. Bangka Belitung merupakan kandidat lokasi pembangunan PLTN oleh BATAN dan kepulauannya diprediksi akan menjadi pionir energi baru dan terbarukan dari mineral ringan yaitu torium. Oleh karena itu, penelitian di Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed-method), dan pengumpulan data dilakukan dengan survei pada 1.500 responden yang terdiri dari penduduk Bangka Belitung. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-Square, sedangkan analisis kualitatif dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menyambut baik rencana pembangunan PLTN tersebut. Total penerimaan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 73,73 persen, yang didukung oleh persepsi masyarakat yang setuju dengan manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, risiko PLTN sebesar 70,93 persen, itikad baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen. Terkait jarak, masyarakat yang setuju pada pembangunan pembangkit listrik ini menginginkan jarak sejauh 30 km dari pemukiman penduduk. Belum ada indikasi fenomena not in my backyard di Bangka Belitung, tetapi masih ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai risiko PLTN. Dikarenakan peran pemerintah yang terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memfasilitasi pendampingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi sosialisasi untuk mengedukasi manfaat dan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir.*

### KEYWORDS

not in my  
backyard  
(NIMBY);  
pembangkit  
listrik tenaga  
nuklir;  
penerimaan  
masyarakat;  
torium

## ABSTRACT

Indonesia, as a country that does not have nuclear power plant (NPP), still requires research to examine public acceptance. Bangka Belitung is a candidate for NPP locations by BATAN, and the islands are predicted to become pioneers of new and renewable energy from a light mineral, thorium. Thus, research in Bangka Belitung aims to determine the public acceptance of an NPP development. This study used a mixed method, and the data were collected by survey with 1,500 respondents consisting of residents in Bangka Belitung. The quantitative analysis in this study was descriptive statistics and Chi-square test, while the qualitative analysis was with descriptive qualitative. The result showed that most Bangka Belitung people welcomed the NPP's development plan. Total public acceptance in Bangka Belitung Province is 73.73 percent. Public perceptions agree with the benefits of NPP at 94.27 percent, the risks of NPP at 70.93 percent, the goodwill of NPP developers at 92.53 percent, and the competence of NPP operators at 93.53 percent. Regarding the distance, the neighbourhood wanted for this electric power plant to be 30 km away from the residential areas. There was no indication of the NIMBY phenomenon in Bangka Belitung, but there were still misperceptions in the community caused by perceptions of the risk of NPP. Due to the limited government role, the DPR RI must step in and facilitate community assistance while encouraging the government to devise effective strategies to develop a dissemination strategy to educate the benefits and risks of nuclear power plants.

### KATA KUNCI

public acceptance;  
nuclear power  
plant;  
not in my  
backyard  
(NIMBY);  
thorium